



RENCANA KERJA (RENJA) APBD PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran yang merupakan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024. Renja Perubahan merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Dengan demikian rencana kerja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dan RPD dan Renstra 2021-2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman , 10 Juli 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



INDRA UTAMA, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP.197501011993111002

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	8
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	8
BAB IV	37
PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Kinerja dan dan Keuangan Tahun 2023.....	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024.....	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan (Triwulan II) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19
Tabel 2.4	Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d 30 Juni 2024.....	20
Tabel 2.5	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Padang Pariaman Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024	26
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja	32
Tabel 3.2	Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh

pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Proses penyusunan APBD Perubahan diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja Perubahan PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD Perubahan.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

- Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
 19. Surat Edaran Bupati Padang Pariaman nomor : 050/219/Bapelitbangda/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sesuai dengan surat edaran Bupati Padang Pariaman tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Serta juga menyesuaikan Target Kinerja Utama (IKU) dalam pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal sesuai dengan APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Rena) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- h. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Menyesuaikan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan SKPD, proses penyusunan Renja Perubahan SKPD, keterkaitan antara Renja Perubahan SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi Target Kinerja dan Keuangan Tahun 2023;
- 2) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan

Berisikan uraian mengenai:

- ❖ Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- ❖ Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

BAB. III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Memuat tujuan, sasaran, indikator tujuan, indikator sasaran dan target kinerja tahun 2024, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2024 yang mencakup perubahan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, dan kelompok sasaran yang dilakukan penambahan maupun pengurangan anggaran. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung.

BAB. IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan DPA APBD Tahun 2023 berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Target Kinerja dan Keuangan Tahun 2023;

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja Tahun 2024					Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	100	100	%	3,810,482,386	3,752,445,925	84.84%
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100	100	100	%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5	5	100	%	19,714,200	17,491,605	88.73%
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20	20	100	%			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100	Dok	15,549,200	13,326,605	85.71%

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100	Dok	4,165,000	4,165,000	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1	1	100	%	2,361,222,445	2,218,423,527	93.95%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	19	100	ASN	2,268,082,445	2,126,243,527	93.75%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100	ASN	93,140,000	92,180,000	98.97%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	3	5	166	ASN	156,890,000	4,968,680	3.17%
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	12	12	100	ASN			
		Jumlah SKP ASN	24	19	79	ASN			
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	24	19	79	ASN			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	-	-	Paket	38,500,000	-	0.00%
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	-	-	ASN	56,400,000	-	0.00%
3	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24	1	4	ASN	8.330.000	4,968,680	8.02%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	500	1400	280	Surat	434,213,600	238,253,382	54.87%
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	79	79	100	Layanan			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	2	67	Paket	7,361,000	2,942,000	39.97%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	3	50	Bulan	29,396,600	9,926,380	33.77%
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	15	125	Laporan	35,250,000	22,814,750	64.72%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100	Laporan	362,206,000	202,570,252	55.93%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah penambahan nilai aset	11	9	82	%	161,826,000	122,505,650	75.70%
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	100	Unit	31,365,000	8,880,000	28.31%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	4	67	Unit	109,371,000	103,940,900	95.04%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	100	Unit	21,090,000	9,684,750	45.92%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12	12	100	Laporan	1,864,942,680	1,697,217,386	91.01%
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12	12	100	Laporan			

1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	Laporan	804,207,560.0	651,805,277	81.05%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	100	Laporan	180,500,000.0	178,874,690	99.10%
3	Penyediaan jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	Laporan	880,235,120.0	866,537,419	98.44%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah objek aset yang dikelola	50	50	100	Unit	182,928,000	97,113,170	53.09%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	100	Unit	41,800,000	23,339,950	55.84%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100	Unit Gedung	85,428,000	51,668,450	60.48%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30	30	75	Unit	55,700,000	22,104,770	39.69%
Program Pendaftaran Penduduk		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	85	83,38	98.08	%	67,017,200	62,994,306	94.00%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	120.000	121.000	100	%	67,017,200	62,994,306	94.00%
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	80	89	110	-	67,017,200	62,994,306	94.00%
Program Pencatatan Sipil		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99.3	99.31	100	%	381,202,706	376,534,852	98.78%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen peristiwa penting pencatatan sipil	3.220	4.268	133	Dokumen	31,200,000	29,876,500	95.76%
1	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	103	103	100	Nagari	31,200,000	29,876,500	95.76%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis	200	220	100	Orang	350,002,706	346,658,352	99.04%
1	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	8	8	100	Laporan	350,002,706	346,658,352	99.04%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	70	70	100	%	33,920,000	28,860,000	85.08%
		Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri	20	20.83	100	%			
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah lembaga yang memanfaatkan kependudukan	26	24	92.30	OPD	29,860,000	27,550,000	92.26%

1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48	48	100	Laporan	29,860,000	27,550,000	92.26%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	70	70	100	Unit Layanan	4,060,000	1,310,000	32.27%
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17	17	100	Laporan	4,060,000	1,310,000	32.27%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100	100	100	%	12,510,000	1,720,000	13.75%
Penyusunan Profil kependudukan		Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan	3	3	100	Buku	12,510,000	1,720,000	13.75%
1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	2	100	Dokumen	3,730,000	-	0.00%
2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	1	100	Dokumen	8,780,000	1,720,000	19.59%
JUMLAH							5.676.386.831	4,866,082,558	85.72%

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Padang Padang Pariaman

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja SKPD tahun n)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-1)	Realisasi Renja SKPD tahun (n- 1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.2.01	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	1 Dok	15 Dok
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	100%	20 Dok	10 Dok	60 Dok
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	3 Dok	20 Dok

	Daerah	Perangkat Daerah								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	100%	5 Lap	2 lap	15 lap
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	3 Lap
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 ASN	19 ASN	19 ASN	19 ASN	100%	19 ASN	19 ASN	19 ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	6 Dok	36 Dok
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	3 ASN	5 ASN	3 ASN	5 ASN	166%	19 ASN	-	19 ASN
		Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	100%	4 ASN	2 ASN	4 ASN
		Jumlah SKP ASN	19 ASN	19 ASN	24 ASN	19 ASN	79%	19 ASN	19 ASN	19 ASN
		Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	19 ASN	19 ASN	24 ASN	19 ASN	79%	19 ASN	19 ASN	19 ASN
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	-	30 Orang	-	-	30 Orang	-	30 Orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	1 Orang	24 Orang	-	4 Orang	3 Orang	-	21 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai	500 Surat	1400 Surat	500 Surat	1320 Surat	270 Surat	500 Surat	296 Surat	1630 Surat

		tujuan								
		Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	79	79	79	79	100	76	76	76
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	10 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Lap	6 Lap	6 Lap	100%	6 Lap	2 Paket	12 Lap
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	15 Lap	`12 Lap	15 Lap	125%	12 Lap	4 Lap	42 Lap
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	`12 Lap	12 Lap	`12 Lap	12 Lap	100%	`12 Lap	-	36 Lap
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	`12 Lap	`12 Lap	`12 Lap	`12 Lap	100%	`12 Lap	6 Lap	36 Lap
		Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	`12 Lap	`12 Lap	`12 Lap	`12 Lap	100%	`12 Lap	6 Lap	36 Lap
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	`12 Lap	`12 Lap	`12 Lap	`12 Lap	100%	`12 Lap	6 Lap	36 Lap
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	36 Lap	36 Lap	36 Lap	100%	36 Lap	18 Lap	108 Lap
	Penyediaan jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	`12 Lap	`12 Lap	`12 Lap	`12 Lap	100%	`12 Lap	6 Lap	36 Lap
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	4 lap	12 Lap
		Jumlah total nilai aset	>4M	>4M	>4M	>4M	100	>4M	>4M	> 4M
	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	1 Unit	21 Unit

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit Gedung	3 Unit Gedung	3 Unit Gedung	3 Unit Gedung	100%	2 Unit Gedung	-	3 Unit Gedung
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	30 Unit	40 Unit	30 Unit	75%	40 Unit	12 Unit	100 Unit
5.2.03	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendafataran Penduduk	85.50%	83,96%	83%	83,38%	98.08%	85%	86.27%	83.33%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendafataran penduduk yang diterbitkan	120.000 Dok	131.233 Dok	120.000 Dok	105.281 Dok	84%	120.000 Dok	17.330 Dok	263.797 Dok
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	80 Lap	89 Lap	111%	85 Lap	64 Lap	89 Lap
5.2.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99.30%	99.31%	99.40%	99.33%	100%	99.50%	99.1%%	99.31%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sip	Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis	220 Petugas	220 Petugas	220 Petugas	220 Petugas	100%	200 Petugas	17 Petugas	220 Petugas
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Petugas Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil yang diikuti/dilaksanakan	-	-	8 Lap	8 Lap	100%	8 Lap	1 Lap	8 Lap
5.2.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	85%	70%	70%	70%	100%	95%	50%	85%
		Persentase Perangkat Daerah mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendageri	20%	20.83	25%	20.83	100%	25%	25%	20.83%

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	44 Lap	24 Lap	26 Lap	24 Lap	92.30%	26 Lap	10 Lap	24 Lap
	Pengumpulan Data dan Database Pemanfaatan dan Penyajian Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Buku	2 Buku	-	-	-	2 Buku	1 Buku	4 Buku
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	26 Lap	26 Lap	100%	26	10	26
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48%	48%	48%	48%	100%	48 Lap	24 Lap	120 Lap
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	70%	70%	70%	70%	100%	80%	50%	80%
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Lap	17 Lap	17 Lap	17 Lap	100%	80 Lap	48 Lap	34 Lap
5.2.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Profil kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang	3 Buku	3 Buku	3 Buku	3 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	5 Buku

		disajikan dan diterbitkan								
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	-	3 Dok

Pariaman, 15 Juli 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INDRA UTAMA, AP,M.Si
NIP.197501011993111002

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). **Tujuan** : Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- b). **Sasaran** :
 - 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Disdukcapil
 - 2. Meningkatnya tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil
- c). **Indikator Kinerja** :
 - 1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil
 - 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - 3. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga
 - 4. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
 - 5. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
 - 6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun
 - 7. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
 - 8. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan
 - 9. Persentase PKS pemanfaatan database kependudukan pada perangkat daerah

Tabel 2.3 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan (Triwulan II) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Disdukcapil	AA	AA	AA	AA	A	A	-	-	Tidak mencapai target kinerja
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	A	A	A	-	-	-	Hasil SKM untuk IKM pada Trw IV
3.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	100	100	100	100	99.91	100	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA/RENJA
4.	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk(KTP Elektronik)	99	99	99	99	99.31	97.15	-	-	Belum tercapai sesuai dengan target RENSTRA/RENJA
5.	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	50	60	70	75	50.93	52.43	-	-	Belum tercapai sesuai dengan target RENSTRA/RENJA
6.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	97	98	98	99	97.95	98.26	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA/RENJA
7.	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100	100	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA/RENJA
8.	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100	100	-	-	Sudah tercapai sesuai dengan target RENSTRA/RENJA
9.	Persentase kerjasama pemanfaatan database kependudukan dengan perangkat daerah	40	50	55	60	92	23.25	-	-	Sebagian PKS sudah habis Kontrak dan sedang dalam Penjajakan kembali dengan PD dan pengajuan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana Dinas telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 2.4 Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d 30 Juni 2024**

Kode	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Keterangan
5.2.01	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,810,489,913	1,801,067,676	47.27	52	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36,130,000	-	-	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,420,000	-	-	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,710,000	-	-	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,660,824,813	1,325,512,735	49.82	49.82	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,562,304,813	1,284,912,735	50.15	50.15	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98,520,000	40,600,000	41.21	41.21	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,440,000	-	-	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3,960,000	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	6,480,000	-	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,364,400	4,124,600	6.83	42	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,895,000	1,000,000	14.50	35	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,869,400	3,124,600	18.52	48	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,000,000	-	-	30	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27,600,000	-	-	60	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	940,012,000	451,037,381	47.98	47.98	
	Penyediaan jasa surat menyurat	19.828.700	6,750,000	34.04	34.04	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	181,000,000	83,887,381	46.35	46.35	
	Penyediaan jasa Pelayanan Kantor	747,012,000	360,400,000	48.25	48.25	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,890,000	20,392,960	20.42	50	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,950,000	1,490,000	3.93	48	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27,840,000	14,527,960	52.18	76	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34,100,000	4,375,000	12.83	45	
5.2.03	Program Pendaftaran Penduduk	21,580,000	-	-	-	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	21,580,000	-	-	-	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	21,580,000	-	-	-	
5.2.03	Program Pencatatan Sipil	1,800,000,000	96,070,792	5.34	30	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sip	1,800,000,000	96,070,792	5.34	30	
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1,800,000,000	96,070,792	5.34	30	
5.2.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26,610,000	-	-	-	
	Pengumpulan Data dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	5,660,000	-	-	-	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	5,660,000	-	-	-	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14,020,000	-	-	-	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5,820,000	-	-	-	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8,200,000	-	-	-	

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6,930,000	-	-	-	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6,930,000	-	-	-	
5.2.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	5,000,000	-	-	-	
	Penyusunan Profil kependudukan	5,000,000	-	-	-	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	5,000,000	-	-	-	

Berdasarkan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa dalam pelaksanaan tahun berjalan (triwulan II tahun 2024) menunjukkan ketidak sesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. Sehingga dirasa perlu dilakukan pergeseran dan perubahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun berdasarkan surat Bupati Padang Pariaman nomor 050/310/Sosbud/Bapelitbangda/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 perihal Penyesuaian Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, pagu anggaran perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 berubah dari **Rp.5.618.679.913,-** menjadi **Rp.5.468.679.923,-**. Terjadi pengurangan anggaran pada Perubahan APBD ini sebesar **Rp.149.999.990,-**.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang perlu dilakukan perubahan anggaran (pengurangan) :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- h. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- i. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

- j. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- k. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- l. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- m. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan tersebut diatas sampai dengan realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2024, belum terealisasi sesuai dengan rencana aksi dan rencana aliran kas. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut diatas.

Dari rincian tersebut diatas, dapat diterangkan bahwa semua target kinerja (IKU dan IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA. 2024 di bebaskan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil. Dimana anggaran kegiatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan (Spesific Grand) APBD Padang Pariaman TA. 2024.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 9 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100% sampai dengan triwulan II Tahun 2024, antara lain :
 - 1. Persentase cakupan kepemilikan KTP EI
 - 2. Persentase cakupan kepemilikan KIA
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
2. Sumber daya aparatur pemerintah masih belum profesional;
3. Pemeliharaan Arsip dan Dokumen yang belum berkelanjutan;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional terutama penunjang pelayanan keliling (mobil pelayanan dan peralatan pendukung lainnya);
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, terutama PNS Tenaga Teknis (Operator SIAK, Administrator dan Teknisi);

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan

dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil evaluasi terhadap rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.2.5 Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Padang Pariaman
Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/ Kegiatan (output) RENJA	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA pada Perangkat Daerah Tahun yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 s/d 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung jawab	Ket
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 12/7*100%		15 = 13+7		16 = 14/5*100%		17	18
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Meningkatn ya tertib administras i dan pemanfaata n database kependudu kan dan pencatatan sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100%	33,876,703,506	100%	5,065,938,745	100%	3,807,660,718	25%	730,000,347	0%	1,071,067,329	25%	1,801,067,676	25%	0.00%	125%	6,867,006,421	100%	20%	Disduk capil	
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100%		100%		100%		25%		25%	50%		50%	150%	100%						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dok	26	1,147,338,455	5	129,578,700	5	36,130,000	1	-	1	-	2	-	40.00 %	0%	100%	120,163,700	4%	10.47%	Disduk capil	
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	Dok	100		20		20		5		5		10	-	50%		100%	18,830,000	1%	#DIV/0!	Disduk capil	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra RKA N+1 Perubahan DPA N+1 Perubahan	Dok	30	275,308,455	16	110,748,700	5	27,420,000	1	-	1	-	2	-	40%	0%	18	110,748,700	60%	40.23%	Disdukca pil	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, Laki, Lap Capkin, LKPD, LKPJ	Dok	18	153,230,000	15	9,415,000	5	8,710,000	2	-	2	-	4	-	80%	0%	19	9,415,000	106%	6.14%	Disdukca pil	
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Dok	5	18,961,390,914	3	7,483,698,035	1	2,660,824,318	1	550,435,831	0.29	775,076,904	1	1,325,512,735	100%	50%	100%	8,809,210,770	20%	46%	Disdukca pil	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Bulan	60	18,337,390,914	36	7,207,788,035	12	2,562,304,318	3	534,195,831	3	750,716,904	6	1,284,912,735	50%	50%	42	8,492,700,770	70%	46%	Disdukcapil	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan ASN	Bulan	60	624,000,000	36	275,910,000	12	98,520,000	2	16,240,000	3	24,360,000	5	40,600,000	42%	41%	41	316,510,000	68%	51%	Disdukcapil	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang	19	289,030,000	19	138,080,000	19	10,440,000	-	-	-	-	0	-	0%	0%	100%	138,080,000	5%	48%	Disdukcapil	
			Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Orang	19		4		4	-	3	-	0	-	3		75%	0%	100%		5%		Disdukcapil	
			Jumlah SKP ASN	Orang	19		19	-	19	-	19	-	0	-	19		100%	0%	100%		5%		Disdukcapil	
			Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	Orang	19		19		19		19	-	19	-	19		100%	0%	100%		5%		Disdukcapil	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN	150	42,300,000	30	57,090,000	30	3,960,000	-	-	10	-	10	-	33%	0%	40	57,090,000	27%	135%	Disdukcapil	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN (administrator) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	ASN	156	246,730,000	21	80,990,000	3	6,480,000	-	-	-	-	0	-	0%	0.00%	21	80,990,000	13%	33%	Disdukcapil	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat	2500	1,542,411,649	1,630	1,153,898,100	500	60,364,400	135	4,124,600	161	-	296.00	4,124,600	5920%	6.83%	100%	1,158,022,700	0%	75%	Disdukcapil	
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Pelayanan	200	-	76	-	76	-	20	-	20	-	40	-	53%	0.00%	100%	-	1%	0%	Disdukcapil	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	16	56,410,000	6	17,109,000	4	6,895,000	1	1,000,000	-	-	1	1,000,000	25%	15%	7	18,109,000	44%	32%	Disdukcapil	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	60	184,627,449	12	59,859,100	6	16,869,400	2	3,124,600	0	-	2	3,124,600	33%	18.52%	14	62,983,700	23%	34%	Disdukcapil	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Laporan	60	276,774,200	36	93,910,000	12	9,000,000	4	-	4	-	8	-	67%	0.00%	44	93,910,000	73%	34%	Disdukcapil	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Laporan	60	1,024,600,000	36	983,020,000	12	27,600,000	3	-	3	-	6	-	50%	0.00%	42	983,020,000	70%	96%	Disdukcapil	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang pemerintah yang tersedia	Bulan	60	5,974,257,000	36	3,564,086,580	12	940,012,000	3	164,567,916	3	286,469,465	6	451,037,381	50%	48%	100%	4,015,123,961	2%	67%	Disdukcapil	
			Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	Bulan	60		36		12		3		3		6									

		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	60	575,291,000	36	1,069,097,460	12	9.828.700	3	5,250,000.0	3	1,500,000.0	6	6,750,000	50%	0%	42	1,075,847,460	70%	187%	Disdukc apil	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Bulan	60	1,030,400,000	36	513,965,000	12	181,000,000	3	37,717,916	3	46,169,465.0	6	83,887,381	50%	46%	42	597,852,381	70%	58%	Disdukc apil	
		Penyediaan Jasa Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Non ASN	180	4,181,866,000	36	1,927,369,120	12	747,012,000	2	121,600,000	3	238,800,000.0	5	360,400,000	42%	48%	41	2,287,769,120	23%	55%	Disdukc apil	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	150	90	949,585,000	90	518,710,000	40	99,890,000	10	10,872,000	16	9,520,960	5	20,392,960	13%	20%	80%	539,102,960	1%	57%	Disdukc apil	
			Jumlah total nilai aset	Rp.	> 3M		> 3M		> 3M		> 3M		> 3M											
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	7	579,043,000	7	306,112,000	7	37,950,000	1	1,325,000	1	165,000	2	1,490,000	29%	4%	9	307,602,000	129%	53%	Disdukc apil	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit Gedung	3	144,720,000	3	116,428,000	2	27,840,000	1	5,172,000	1	9,355,960.00	2	14,527,960	100%	52%	5	130,955,960	167%	90%	Disdukc apil	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	150	225,822,000	70	96,170,000	40	34,100,000	10	4,375,000	10	-	20	4,375,000	50%	13%	90	100,545,000	60%	45%	Disdukc apil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	87	2,141,977,564	83.33 %	1,377,048,000	85.00 %	21,580,000	85.50	-	86.27	-	20	-	23.53	0%	83.33 %	527,174,950	1%	25%	Disdukc apil	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Dok	150,000	30000	143,500	527,174,950	120,000	21,580,000	10,080	-	32,300	-	20	-	0%	0%	0%	527,174,950	0%	1757250%	Disdukc apil	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan	260	114,100,000	89.00	67,017,200.00	80	21,580,000	57	-	13	-	70	-	0%	0%	159	67,017,200	61%	59%	Disdukc apil	Layanan Nagari, Sekolah, TDS
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	99.60 %	1,120,906,862	99.32 %	800,171,713	99.5	1,750,000,000	105 %	-	105.8 %	96,070,792	114.82	96,070,792	115%	5%	97.05 %	201,769,007	97%	18%	Disdukc apil	

		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah SDM Petugas Pelayanan yang diberikan bimbingan teknis	ASN	55	113,727,047	55	350,002,706.00	55	1,750,000,000	-	-	-	96,070,792	0	96,070,792	0%	5%	55	446,073,498	100%	392%	Disdukcapil	
		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Petugas Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil yang diikuti/dilaksanakan	ASN	32	34,400,000	8	350,002,706	8	1,750,000,000	-	-	1	96,070,792	1	96,070,792	13%	5%	9	446,073,498	28%	1297%	Disdukcapil	Efisiensi Anggaran
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%	90		80		95		25		25		50		53%	0.00%	44	9,340,000	49%	1%	Disdukcapil	
			Persentase Perangkat Daerah yang mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri	%	100	999,891,140	20.83	331,731,000	25	26,610,000	48%	-	22%	-	1	-	3%		34		34%			
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang dikelola	Dok	10	42,570,600	6	9,340,000	2	5,660,000	1	-	-	-	100%	-	50%	0%	5	9,340,000	50%	22%	Disdukcapil	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dok	10	42,570,600	4	9,340,000	2	5,660,000	1	-	-	-	1	-	50%	0%	5	9,340,000	50%	22%	Disdukcapil	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Perangkat Daerah	43	1,270,661,736	24	288,776,000	26	14,020,000	10	-	5	-	15	-	58%	0.00%	39		91%	0%	Disdukcapil	
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	26	5,640,000	26	5,670,000.00	26	5,820,000	8	-	2	-	10	-	38%	0%	36	5,670,000	138%	101%	Disdukcapil	
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan terkait PIAK	Laporan	180	116,670,000	120	102,815,000	12	8,200,000	3	-	3	-	6	-	50%	0%	126	102,815,000	70%	88%	Disdukcapil	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Unit	103	564,865,048	103	33,615,000	80	6,930,000	24	-	28	-	5200%	-	65%	0%	155	113,225,000	150%	20%	Disdukcapil	

		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	85	116,683,443	17	22,190,000	80	6,930,000	20	-	28	-	48	-	60%	0%	65	22,190,000	76%	19%	Disdukcapil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	%	100	84,027,192	70	31,670,000	100	5,000,000	25%	-	25%	-	50%	-	50%	0%	300	23,970,000	300%	29%	Disdukcapil	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan	Buku	5	84,027,192	3	31,670,000	1	5,000,000	0	-	-	-	0	-	0%	0%	3	23,970,000	60%	29%	Disdukcapil	
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	51,249,335	1	7,700,000.00	1	5,000,000	-	-	-	-	0	-	0%	0	3	7,700,000	60%	15%	Disdukcapil	Efisiensi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja (%)																								
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*):																								

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Padang Pariaman Nomor : 050/219/Bapelitbangda/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Surat Bupati Padang Pariaman nomor : 050/310/Sosbud/Bapelitbangda/VII/2024 perihal Penyesuaian Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyusun Perubahan Rencana kerja (RENJA (OPD) yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Adapun perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 tak lepas dari Perbup tentang Penjabaran APBD TA. 2024. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Nilai LPPD	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Disdukcapil	1. Nilai SAKIP Disdukcapil	Indeks	AA
		2. Opini BPK		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100
				4. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	%	99.5
				5. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	60
				6. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dibawah umur 18 tahun	%	98
				7. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100
				8. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100
				9. Persentase PKS pemanfaatan database kependudukan pada perangkat daerah	%	50

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD) PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	
										TARGET 2024	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
															NASIONAL		DAERAH
2					3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,668,679,913	5,518,679,923	-	DAU			
2	12										5,668,679,913	5,518,679,923		DAU			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	3,815,489,913	3,718,679,923		DAU			
						Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%							
2	12	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	26 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	36,130,000		-Disdukcapil	DAU			
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	100 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen							
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	27,420,000		-Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	8,710,000		-Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan					2,660,824,813	2,660,824,813	Disdukcapil	DAU			
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19 ASN	19 ASN	19 ASN	19 ASN	2,562,304,813	2,562,304,813	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan	12 ASN	12 ASN	12 ASN	12 ASN	98,520,000	98,520,000	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	19 ASN	5 ASN	3 ASN	3 ASN	10,440,000		-Disdukcapil	DAU			

						Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	19 ASN	10 ASN	5 ASN	5 ASN						
						Jumlah SKP ASN	19 ASN	19 ASN	19 ASN	19 ASN						
						Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	19 ASN	19 ASN	19 ASN	19 ASN						
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	3 Orang	30 Orang	30 Orang	3,960,000		-Disdukcapil	DAU		Disdukcapil
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	156 Orang	16 Orang	3 Orang	3 Orang	6,480,000		-Disdukcapil	DAU		Disdukcapil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	2500 Surat	500 Surat	500 Surat	500 Surat	60,364,400	28,074,410	Disdukcapil			
						Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	200 Pelayanan	76 Pelayanan	76 Pelayanan	76 Pelayanan						
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 oaket	3 paket	3 Paket	3 Paket	6,895,000	6,895,000	Disdukcapil	DAU		Disdukcapil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	6 Paket	6 Paket	5 paket	16,869,400	12,179,410	Disdukcapil	DAU		Disdukcapil
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	24 Laporan	12 laporan	12 Laporan	9,000,000	9,000,000	Disdukcapil	DAU		Disdukcapil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	24 Laporan	12 laporan	12 Laporan	27,600,000		-Disdukcapil	DAU		Disdukcapil
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	947,840,700	947,840,700	Disdukcapil			Disdukcapil
						Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan						
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19,828,700	19,828,700	Disdukcapil	DAU		Disdukcapil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	181,000,000	181,000,000	Disdukcapil	DAU		Disdukcapil
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	747,012,000	747,012,000	Disdukcapil	DAU		Disdukcapil
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	250 Objek Aset	50 Objek Aset	50 Objek Aset	50 Objek Aset	99,890,000	81,940,000	Disdukcapil			Disdukcapil
						Jumlah total nilai aset	> 3 Milyar	> 3 Milyar	> 3 Milyar	> 3 Milyar						

2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	37,950,000	20,000,000	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	3 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	27,840,000	27,840,000	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	40 Unit	40 Unit	34,100,000	34,100,000	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	85%	83%	85%	85%	21,580,000		-Disdukcapil				Disdukcapil
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	150,000	30,000		30,000	21,580,000		-Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	2	2	2.01	1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	260 Laporan	-	80 Laporan	80 Laporan	21,580,000		-Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99%	97.06%	95%	95%	1,800,000,000	1,800,000,000	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	75%	N/A	60%	60%	1,800,000,000	1,800,000,000	Disdukcapil	DAU Tagging			Disdukcapil
2	12	3	2.03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	32 laporan	N/A	6 Laporan	6 Laporan	1,800,000,000	1,800,000,000	Disdukcapil	DAU Tagging			Disdukcapil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	90%	80%	80%	80%	26,610,000		-Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
						Persentase Perangkat Daerah yang mengirimkan Data Balikan Akses Kependudukan ke Kemendagri	30%	20%	25%	25%							
2	12	4	1.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang dikelola	10 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	5,660,000		-Disdukcapil	DAU			
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	10 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	5,660,000		-Disdukcapil	DAU			
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		N/A	100%	N/A	14,020,000		-Disdukcapil	DAU			Disdukcapil

2	12	4	2.03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26 Laporan	0	26 Laporan	26 Laporan	5,820,000	-	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60 laporan	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	8,200,000	-	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	4	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Unit layanan yang dilakukan pembinaan dan pembinaan	90%	N/A	70%	70%	6,930,000		Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	180 laporan	75 laporan	80 laporan	80 laporan	6,930,000	-	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	5	PROGRAM PEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	90%	90%	90%	90%	5,000,000	-	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	5	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah Buku Profil Kependudukan yang disajikan dan diterbitkan	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	5,000,000	-	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	-	Disdukcapil	DAU			Disdukcapil

BAB IV

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Disdukcapil Tahun 2024 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Disdukcapil perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Disdukcapil harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Disdukcapil dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan rincian RENJA Perubahan Anggaran Tahun 2024, terdapat pengurangan anggaran pada belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebesar **Rp.149.999.990,-**. Dari APBD awal sebesar **Rp.5.618.679.913,-** menjadi **Rp.5.468.679.923,-**. Perubahan anggaran ini, menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran Perubahan (RKAP) dan DPA Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi Disdukcapil yang lebih Cepat, Efisien, Responsif, Inovatif dan Akuntabel (**CERIA**).

Pariaman, 10 Juli 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



INDRA UTAMA, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.C
NIP 197501011993111002